

## Implementasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia (Study Kasus Laporan Arus Kas Pemda DKI Jakarta)

**Abu Bakar**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi  
Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957  
Email: [Abubakar00012248@gmail.com](mailto:Abubakar00012248@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi akuntansi sektor publik di Indonesia dengan penekanan pada pertama, bagaimana distribusi sub-sumber penerimaan kas terhadap laporan arus kas, kedua bagaimana keselarasan arus kas operasional, kedua bagaimana profil penerimaan tunai laporan arus kas dari investasi, ketiga bagaimana kejelasan arus kas investasi dan keempat bagaimana esensi laporan arus kas investasi. dan ke lima bagaimana dampak Covid-19 terhadap arus kas akuntansi sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi untuk menggambarkan berbagai pola hubungan Hasil penelitian ini menunjukan pertama distribusi penerimaan kas berasal dari lima sumber pendapatan. Kedua sumber kas investasi tidak mencerminkan pendapatan dari kegiatan investasi pemerintah dan ketiga tidak terjadi keselarasan dalam pencatatan investasi yang sebenarnya selisih penjualan dan Perolehan aktiva tetap dan penjualan aktiva bekas pakai. Ke empat esensi laporan arus kas investasi telah kehilangan esensinya dalam penyajian informasi arus kas yang berasal dari kegiatan investasi. Kelima, covid-19 yang berdampak secara ekonomi tetapi tidak berpengaruh dalam pencatatan arus kas pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Akuntansi Sektor Publik, Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Keuangan DKI Jakarta

### Abstract

*This study aims to determine the implementation of public sector accounting in Indonesia with an emphasis on first, how is the distribution of sub-sources of cash receipts to cash flow statements, second how is operational cash flow alignment what is the profile of cash receipts cash flow reports from investments, third how is investment cash flow alignment and fourth, what is the essence of the investment cash flow statement. This study uses a description method to describe various relationship patterns and fifth how the impact of covid 19 has on the cash flow of public sector accounting. The results of this study show that the first distribution of cash receipts comes from five sources of income. The two sources of investment cash do not reflect income from government investment activities and the third is that there is no alignment in recording the actual investment, the difference between sales and acquisition of fixed assets and sales of used assets. The four essences of the investment cash flow statement have lost their essence in presenting cash flow information originating from investing activities. Fifth, Covid-19 which has an economic impact but has no effect on recording local government cash flows*

**Keywords:** *Public Sector Accounting, Financial Statements, Cash Flow Statements, DKI Jakarta Financial Statements*

## Pendahuluan

Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 37 provinsi (Ferezagia, 2018, p. 4) dimanah setiap provinsi memiliki karakteristik pendapatan asli daerah yang beragam sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 setiap daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan masing-masing (Leonardus Julyano Sema, 2021, p. 4) (Riftiasari, 2018, p. 191)(Saraswati, 2018, p. 54) menurut perakarsa sendiri (Bakhrudin et al., 2020, p. 1) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amalia & Purbadharmaja, 2014, p. 1) dan pembangunan daerah sejalan dengan pembangunan pusat. (Ahmad, 2021, p. 19) Sehingga bisa disimpulkan bahwa pelimpahan dari pusat kepada daerah dalam untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.(Setiaji & Adi, 2007, p. 19) pelimpahan tersebut disebut sebagai otonomi daerah(Akbar, 2016, p. 33) (Mutih, 2016, p. 106) (Bakar, 2022a, p. 233)

Covid-19 yang dianggap sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan (Pangaribuan et al., 2021, p. 2). Data per tanggal 3 April 2020, kasus positif terjangkit *Covid-19* telah mencapai 1.986 orang (Wadi1, 2020, p. 614) sehingga dianggap sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 (Seputra, 2020, p. 409) dan sampai saat ini belum dapat dihentikan penyebarannya. (ISMAIL, 2020, p. 427) Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia di bawah 2%, jauh di bawah prediksi sebelumnya yang mencapai 2,5% (World Bank, 2020) (Studi et al., 2021, p. 5). Pemerintah mengantisipasi covid-19 dengan memperkuat jaring pengaman sosial (Publicuho et al., 2020, p. 274) dan melakukan tindakan berupa pembatasan pertemuan. Kebijakan ini banyak berpengaruh pada sektor ekonomi nasional.

Sejalan berkembangnya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat menjadi satu tuntutan yang umum atas kinerja keuangan. (Kiranayanti & Erawati, 2016, p. 1291). Dengan otonomi daerah, setiap kepala diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan (Kusnandar & Siswantoro, 2018, p. 19). yang mengacu pada mekanisme akuntansi pemerintahan (Mole, 2015, p. 1060) walaupun dalam penyusannya banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah (Bakar & Khair, 2022, p. 2899). Penyusunan dan penyajian laporan terbuka dan jujur (Al Quran, Al Ahzab 70) karena bisa diakses secara langsung (Mutih, 2016, p. 120). transparansi dan akuntabilitas (Novtania Mokoginta, Linda Lambey, 2017, p. 857) menggambarkan kondisi suatu pemerintah (As Syifa Nurilah, 2014, p. 1) secara periodik (Riesmiyantiningtias & Siagian, 2020, p. 245) serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Mole, 2015, p. 160). mengacu pada Standar akuntansi pemerintahan (P. E. Ningtias & Widyanti, 2015, p. 4) yaitu UU No. 17 tahun 2003 (Bakar, 2022b, p. 54) merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.(Bakar, 2022a, p. 234)

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Standar akuntansi Pemerintahan -SAP; peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005)(Bakar, 2022b, p. 55) Sesuai dengan PP 71 tahun 2010 unsur laporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran Catatan atas Laporan Keuangan (Novtania Mokoginta, Linda Lambey, 2017, p. 877) diperiksa oleh BPK (Mutih, 2016, p. 108) dan diberikan opini atas kewajiban penyajian laporan keuangan (Albugis, 2016, p. 79).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam laporan arus kas setiap akhir tahun menggambarkan pendapatan operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris serta saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu (P. E. Ningtiyas & Widyanti, 2015, p. 6). Tabel di bawah ini memperlihatkan arus kas pada provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020 mulai dari arus kas operasional hingga arus kas transitoris

**Tabel 1.** Arus Kas Pemerintah Provinsi DKI 2016-2020 (dalam Jutaan)

Arus Kas/Tahun	2020	2019	2018	2017	2016
Arus Kas Operasional	5.770.407,46	7.271.923,03	13.877.908,56	21.888.949,95	14.175.370,67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	- 4.449.136,83	- 15.783.957,03	- 17.254.794,86	- 17.193.411,67	- 11.342.242,35
Arus Kas Pendanaan	2.630.453,96	- 33.629,62	- 33.629,62	- 16.814,81	793.385,88
Arus Kas Transitoris	15.446,81	- 1.432,94	- 34.470,52	- 283.940,96	- 329.377,50
Penerimaan dan Kas BULD	5.181.272,39	1.204.100,75	9.756.644,97	13.169.843,33	8.723.737,51

Sumber: Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta yang telah diaudit Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

Dari tabel 1 terlihat dapat diketahui bahwa pertama sumber pendapatan terbesar pada Provinsi DKI Jakarta bersumber dari pendapatan operasional daerah tetapi sejak 2017 mengalami penurunan terus menerus. *Kedua* arus kas yang berasal dari investasi selalu dalam keadaan negatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dan *ketiga* adalah jumlah nominal minus terbesar berasal dari pendapatan investasi. *keempat*, dari Tabel di atas perlu di pertanyaan berapa hal Kenapa arus pendanaan selalu bersaldo negatif kecuali tahun 2020, sumbangan pendapatan terbesar berasal dari pendapatan operasional dan sepanjang lima tahun, kenapa tahun 2017 pendapatan operasional memberikan sumbangan terbesar, kenapa arus kas investasi selalu dalam keadaan negatif?, apakah klasifikasi dan pengelompokan Jenis arus kas sesuai dengan akuntansi berlaku umum? Bagaimana penyajian arus kas yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi sektor publik untuk pemda DKI Jakarta?

## Tinjauan Pustaka

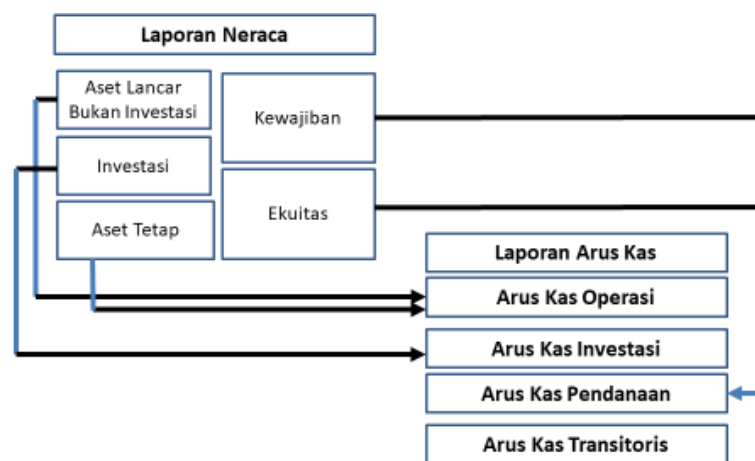
### Laporan Keuangan

Akuntansi keuangan memberi wawasan kepada para pemangku kepentingan dalam bentuk laporan keuangan standar, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyediakan informasi keuangan (J. D. A. Ningtiyas, 2017, p. 12) atau suatu penyajian terstruktur posisi keuangan dan kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas (Zulkifli et al., 2019, p. 5) yang dirancang untuk pengambilan keputusan (Suteja, 2018, p. 12) berisi kondisi keuangan pada satu periode tertentu. (Trianto et al., 2017, p. 9) yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan. (Bakar, 2022a, p. 234) Laporan keuangan merupakan media manajemen untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan satu entitas bisnis (Nansy Narty Hardianty Sumajow1 et al., 2021, p. 9). Oleh karenanya laporan tersebut harus dibuat secara transparan. (Barth & Schipper, 2008, p. 174)

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas (Bakar, 2022b, p. 54) dengan tujuan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. (Fauziah & Handayani, 2017, p. 3)

## Laporan Arus Kas

Laporan arus kas sangat penting walaupun Pengusaha Kecil menengah di Inggris banyak yang merasa tidak membutuhkan laporan arus kas (Sian & Roberts, 2009, p. 302) yang menunjukkan perubahan kas dan penjelasan mengenai alasan perubahan (Romy P. Mansaleo, Hendrik Manossoh, 2016, p. 965) berisi informasi aliran kas masuk dan kas keluar (Nadiyah & Suryono, 2017, p. 3) (Kaunang, 2013, p. 460) pada periode tertentu (Milyanti, 2010, p. 2). kas yang tersedia dan digunakan (Prihanto & Damayanti, 2022, p. 30). Digunakan untuk melihat kemampuan membayar utang jangka panjang (Hasibuan & Wahabsamad, 2022, p. 30). diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan selama satu periode” (Widjanarko & Nurmelia, 2020, p. 52) dan di perlukan untuk keputusan investasi (Nurdiana, 2021, p. 28) yang harus dipublikasikan (Bakar, 2022b) (Bakar, 2022c, p. 255) Laporan arus kas merupakan penjelasan lebih mendalam dari penggunaan aset pemerintah daerah bagaimana di gambarkan di bawah ini.



**Gambar 1.** Hubungan Laporan Neraca dan Laporan Arus Kas (diolah sendiri)

Arus kas operasi menggambarkan jumlah pendapatan tunai dari pendapatan utama perusahaan (Sitepu et al., 2018, p. 239). hasil operasi yang berkelanjutan (Scott, 2015, p. 3) dapat diprediksi berdasarkan pendapatan yang ditentukan saat ini (Cohen, 2003, p. 10) Penyajian arus kas operasi dapat dilakukan melalui metode langsung dan tidak langsung. (Wood & Sangster, 2013, p. 262). Arus kas investasi, berasal dari kata dasar *invest* (Inggris) atau *istathmara* (Arab) yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya (Pardiansyah, 2017, p. 340). (Sunder, 2001, p. 8) Menurut pasal 1 ayat 3 PP Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 “investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang” atau sebagai mengorbankan aset yang dimiliki untuk mendapatkan aset yang lebih besar pada masa akan datang. (Sartini & Purbawangsa, 2014, p. 83) tindakan pelepasan uang atau dana pada saat sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. (Dewi et al., 2013, p. 178) yang dicatat dengan metode biaya atau metode ekuitas (Edwards, J.D. & Hermanson, 2013, p. 600) Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang. (Saputra et al., 2019)

Arus kas pembiayaan adalah aktivitas kas yang melibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi modal serta posisi pinjaman perusahaan. (Sitepu et al., 2018, p. 239). PSAP No. 3 menyebutkan aktivitas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan saldo defisit atas penggunaan anggaran.

## Metode, Data dan Analisis

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sebagaimana dilakukan Andrianty (Andrianty & Yunaz, 2020, p. 84) Riyanti (Riyantie et al., 2021, p. 255), Silvia (Noveliza et al., 2022) dan Mayasari (Mayasari & Al-Musfiroh, 2020, p. 87) serta banyak peneliti lainnya. Teknik ini menggunakan data primer dan sekunder. (Andrianty & Wahab, 2019, p. 285) data primer berupa laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta Tahun 2016 hingga 2020 sementara data sekunder adalah berbagai sumber referensi dan teori sebagai pendukung seperti teori.

## Hasil dan Pembahasan

### Distribusi Pendapatan Arus Kas

Laporan arus kas pemerintah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 3 terdiri dari arus kas operasional, investasi dan pendanaan serta transitoris sebagaimana tabel 2. Sepintas laporan tersebut lengkap dan transparan yang memuat berbagai sumber dan penggunaan pendanaan. Tabel 2 memperlihatkan pendapatan akrual basis dominasi oleh pendapatan operasional yang di ikuti penerimaan kas dari sumber-sumber lainnya.

Dari tabel dua dapat dipahami dan ditarik kesimpulan *pertama* sepanjang tahun tidak ada penerimaan kas yang mampu melampaui pendapatan kas operasional, *kedua* pendapatan investasi selalu lebih rendah dari pengeluaran investasi, *Ketiga* Pendapatan terbesar kedua berasal dari penerimaan kas BULD dan *kelima* sumber dana berasal dari pendanaan hanya sekali terjadi bersaldo positif yang terjadi pada tahun 2020, keenam penerimaan kas dari badan usaha layanan daerah (BULD) dalam lima tahun memberikan kontribusi 60% dari pendapatan arus kas operasi dan dari investasi negatif 104,8% yang artinya sektor investasi memberikan kontribusi terkecil dalam penerimaan kas pemda DKI Jakarta. Lebih jelas dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.** Persentase Arus Kas Lainnya terhadap Arus Kas Operasional Tahun 2020 dan sebelumnya

	Tahun					Rata-Rata
	2020	2019	2018	2017	2016	
Arus Kas Operasional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-77,1%	-217,1%	-124,3%	-78,5%	-80,0%	-104,8%
Arus Kas Pendanaan	45,6%	-0,5%	-0,2%	-0,1%	5,6%	5,3%
Arus Kas Transitoris	0,3%	0,0%	-0,2%	-1,3%	-2,3%	-1,0%
Penerimaan dan Kas BULD	89,8%	16,6%	70,3%	60,2%	61,5%	60,4%
Rata-rata	31,7%	-20,2%	9,1%	16,1%	17,0%	12,0%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta Tahun 2016-2020

Tahun 2020 terjadi pertama sekali penerimaan kas dari BULD hampir menyamai penerimaan dari arus kas operasional. Rata-rata penerimaan arus kas merupakan yang terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya; 31,7%. Tahun 2018 dan 2019 memperlihatkan sumber arus kas bersaldo positif untuk arus kas operasi masih terjadi sebagaimana tahun 2017; hanya kas dari pendapatan operasional dan kas dari BULD bersaldo positif. Rata-rata penerimaan arus hanya 9,1% untuk tahun 2018 dan minus 20,2% untuk tahun 2019 ( jumlah rata-rata terkecil selama lima tahun). Penyebab minus tersebut

adalah rendahnya pendapatan arus kas dan bersaldo kas negatif untuk aktivitas investasi lebih dari minus 200%.

### Keselarasian Laporan Arus Kas Operasi

Keserasian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keharmonisan, kesepadanan, keselarasan yaitu keselarasan antara laporan neraca dengan laporan arus kas dan laporan keuangan sektor publik lainnya.

**Tabel 3.** Perincian Laporan Arus Kas Operasi tahun 2020 dan 4 Tahun Sebelumnya (dalam Jutaan Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	TAHUN				
	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Arus Kas Masuk:</b>					
Penerimaan Pajak Daerah	31.895.263	40.298.123	37.538.912	36.500.782	31.613.198
Penerimaan Retribusi daerah	496.333	587.384	578.556	624.137	675.475
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	672.492	619.456	592.956	489.479	303.204
Penerimaan selain Pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan					
<b>Jumlah</b>	<b>54.032.394</b>	<b>60.658.359</b>	<b>61.169.224</b>	<b>61.849.743</b>	<b>52.230.432</b>
<b>Arus Kas Keluar:</b>					
Pembayaran Pegawai	16.686.871	22.016.852	21.852.417	20.228.739	19.359.807
Pembayaran Barang	16.775.618	20.807.659	16.919.582	13.619.324	12.954.392
Pembayaran Bunga	62.300	60.785	44.049	31.897	11.739
Pembayaran selain belanja pegawai, barang dan bunga					
<b>Jumlah</b>	<b>48.261.987</b>	<b>53.386.436</b>	<b>47.291.315</b>	<b>39.960.793</b>	<b>38.055.061</b>
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>5.770.407</b>	<b>7.271.923</b>	<b>13.877.909</b>	<b>21.888.950</b>	<b>14.175.371</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta yang Sudah diaudit

Laporan arus kas menyelaraskan komponen aset lancar, aset tetap dan aset investasi atau aset yang dipisahkan dari kekayaan pemerintah daerah. Selain itu keselarasan antara peraturan yang ada juga merupakan harmonisasi yang perlu. (Tambunan, 2021, p. 459) Tabel 3 di atas dapat diketahui sumber penerimaan kas dari hasil investasi diklasifikasikan sebagai Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada kenyataannya penerimaan kas hasil investasi berasal dari bagian laba BUMD dan dari bagian dividen penyertaan modal pada PT pihak ketiga. Laporan tersebut memberikan pemahaman yang berbeda dengan pengertian investasi tidak sebagaimana pengertian investasi dalam PSAP No. 6 dan PP DN No. 52 tahun 2012.

Laporan Neraca Pemda DKI sub aset lancar diklasifikasikan sebagai aset lancar Bukan Investasi, Investasi dan aktiva tetap. Aset bukan investasi dan aktiva tetap digunakan untuk menciptakan pendapatan operasi dan aset investasi digunakan untuk menciptakan pendapatan di luar operasi pemerintah DKI dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian satu daerah pada umumnya (Ansari et al., 2020, p. 432). Jumlah akumulasi Investasi pemda DKI sebagaimana di bawah ini.

**Tabel 4.** Investasi Provinsi DKI Jakarta in 2016-2020 in Millions of Rupiah

No	Year	Non Permanent Investment*	Permanent Investment**	Total	Total Asset
1	2016	70.645	28.538.235,8	28.608.880,0	442.977.223,0
2	2017	3.136.606	40.818.731,9	43.955.337,6	464.601.747,1
3	2018	4.712.278	47.246.004,7	51.958.283,1	492.902.439,2
4	2019	349.986	61.060.348,6	61.410.334,2	517.155.089,7
5	2020	350.001	66.616.669,8	66.966.670,3	520.360.899,9

Sumber: Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta yang sudah di audit\* investasi jangka panjang yang dimasukkan bukan untuk dimiliki \*\*adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki \*\*

Sejatinya di dalam laporan arus kas terlihat dengan jelas dan terinci karena investasi sebesar 12,9% dari total aset pemda DKI Jakarta cukup besar. Investasi tersebut tersebar di dalam 5 perusahaan BUMD, 11 perusahaan patungan mulai dari PT Kawasan Berikat Nusantara hingga PT Delta Jakarta dan tersebar dalam 6 perusahaan milik pemerintah yang berbadan hukum perseroan terbatas mulai dari PT Food Station hingga PT Penjaminan Kredit (Tabel 5). Investasi Pemda DKI diletakan di dalam bagian dari pendapatan operasi perusahaan sehingga tidak terlihat dengan nyata dalam beberapa hal, berapa hasil yang diperoleh, Penyembunyian tersebut dapat diterjemahkan menjadi Penyamaran informasi keuangan dan pembatasan informasi keuangan secara langsung. Penyamaran informasi keuangan memperlihatkan seakan akan hasil investasi tidak memiliki masalah dan tetap berkinerja baik sehingga tidak perlu dipertanyakan. *Penyembunyian informasi* keuangan terlihat dengan jelas bahwa hasil kas investasi yang disajikan bukan merupakan kas yang berasal dari investasi. sumber lain yang dimasukkan ke dalam kelompok arus kas investasi menimbulkan opini bahwa pendapatan tersebut benar berasal dari pendapatan investasi. *Pembatasan informasi keuangan* akan terlihat dengan dimasukkan hasil investasi ke dalam grup sumber kas operasional membuat asumsi bahwa pendapatan tersebut berasal dari operasional pemda dengan mengorbankan sejumlah aset tetap dan aset bukan investasi

Secara rinci Rasio kepemilikan pemda DKI Jakarta sebagaimana di bawah ini:

**Tabel 5.** Rasio Investasi di BUMD, Pihak Ketiga dan Perusahaan Daerah dalam Bentuk Perseroan Terbatas

BUMD	Investment Ownership	Ratio in Private Companies (Third Parties)	Investment Ownership Ratio	Investment in Limited Companies	Investment Ownership Ratio
PAM Jaya	100%	PT. Kawasan berikat Nusantara	26,85%	PT Food Station	99,90%
PD Dharma Jaya	100%	PT Cemani Toka	27,42%	PT Jakarta Propertindo	99,90%
PT Pembangunan Sarana Jaya	100%	PT Asuransi Bangun Askrida	4,45%	PT Bank DKI JAKARTA	99,90%
PD Pasar Jaya	100%	PT Jakarta Internasional EXPO	13,14%	PT Jakarta Toursindo	99,36%
PD Pal Jaya	100%	PT Grahasahari Suryajaya	13,14%	PT Mass Rapid Transport	99,90%
		PT Ratax Armada	28,00%	PT Penjaminan Kredit	98,70%
		PT Rumah Sakit Haji	51,00%		
		PT Pakuan Internasional	1,4%*		
		PT Pembangunan Jaya	38,80%		
		PT JIEP	50%		
		PT Delta Jakarta	26,25%		

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang Sudah di Audit.

### Keselarasan Arus Kas Investasi

Investasi merupakan salah satu modal pembangunan (Apriansyah & Bachri, 2006, p. 80) dan sejatinya arus kas investasi memuat informasi dari investasi yang dilakukan oleh PEMDA DKI Jakarta. Berdasarkan Pasal 41 UU 1/2004 telah mengatur Menteri Keuangan dalam kewenangannya melakukan investasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial. (Tambunan, 2021, p. 457)

Laporan arus kas di atas (tabel 6) memuat informasi tentang penjualan aset Pemda DKI yang semula digunakan bukan dari hasil investasi. Esensi dasar data informasi keuangan tersebut secara akuntansi dan keuangan tidak masuk dalam klasifikasi sebagai investasi melainkan sebagai penambahan atau pelepasan aktiva tetap (disposal). Pemda DKI Jakarta bukan perusahaan dagang dimana institusi membeli aset bukan untuk persediaan, melainkan untuk digunakan sehingga bisa dipastikan penerimaan arus kas investasi berasal dari barang yang tidak terpakai lagi atau tidak produktif lagi. Penerimaan jenis ini dalam

akuntansi pada umumnya dianggap sebagai pendapatan lain-lain. Esensi dasar dari investasi sebagaimana di tabel 4 sebesar Rp 66.9 triliun tidak terungkap dan informasi dari tabel 5 tersaji tidak transparan.

Laporan arus kas investasi yang disajikan oleh pemda DKI Jakarta tahun 2016-2020 sebagaimana di bawah ini:

**Tabel 6.** Arus Kas Investasi Pemda DKI Jakarta 2016-2020 (dalam Jutaan Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Arus Kas Masuk:</b>	-	-	-	-	-
Penjualan atas Tanah	-	18.810,2	9.700,0	177.692,0	-
Penjualan atas Barang dagang	1.543,0	-	2.076,0	-	-
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	2.608,4	8.771,8	3.653,0	309,8	333,2
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	3.752,8	18.781,6	9.870,0	9.618,8	6.692,9
Penjualan aset lainnya	-	-	-	5.924,3	7.781,0
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	521,8	1.717,7	314,4	1.542,8	338.475,9
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah	-	-	650.000,0	-	-
pencairan dana cadangan	1.474.792,3	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.483.218,4</b>	<b>48.081,2</b>	<b>675.613,4</b>	<b>195.087,8</b>	<b>353.283,1</b>
<b>Arus Kas Keluar:</b>	-	-	76.817,8	79.391,5	81.576,0
Pembentukan Dana Cadangan	95.680,8	95.110,5	5.493.373,9	1.291.847,0	1.970.939,9
Perolehan Tanah	966.123,9	2.338.517,7	2.499.084,1	1.927.676,8	1.894.719,6
Perolehan Peralatan dan Mesin	762.361,4	2.816.344,1	3.791.472,2	5.842.951,4	1.693.089,6
Perolehan Gedung dan Bangunan	413.055,9	3.812.556,4	2.196.580,5	1.980.017,4	2.953.696,7
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	918.001,2	2.429.057,5	138.295,1	4.622,0	239.650,5
Perolehan Aset Tetap Lainnya	113.681,0	155.452,1	3.734.784,6	6.261.993,5	2.861.853,0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.663.206,2	3.835.000,0	-	-	-
pembayaran fasilitas perumahan	-	350.000,0	-	-	-
Kerugian selisih kurs dalam pengelolaan Rekening BUMD	244,6	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.932.355,2</b>	<b>15.832.038,3</b>	<b>17.930.408,3</b>	<b>17.388.499,5</b>	<b>11.695.525,4</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>-4.449.136,8</b>	<b>-15.783.957,0</b>	<b>-17.254.794,9</b>	<b>-17.193.411,7</b>	<b>-11.342.242,4</b>

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, 2019, 2018, 2017 dan 2016

### Esensi Laporan Arus Kas Investasi

Esensi laporan arus kas investasi adalah tersajinya penerimaan tunai yang berasal dari investasi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2012 menyebutkan pengertian investasi pemerintah adalah *penempatan sejumlah dana* dan atau barang dalam waktu jangka panjang untuk pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok dan manfaat ekonomi. Pengertian tersebut sangat jelas bahwa investasi bukan pembelian aset tetap atau diterjemahkan sebagai pembelian aktivis tetap untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana di perlihatkan di laporan arus kas Pemda DKI Jakarta. Pasal 2 ayat 2 memberikan informasi tambahan bahwa *tujuan investasi* adalah untuk memperoleh keuntungan berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah, adanya peningkatan jasa, penerimaan daerah sebagai akibat dari investasi yang bersangkutan dan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dipahami BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah sebagaimana di katakan oleh Erwinsyah dan Anshari. (Erwinsyahbana et al., n.d., p.185) (Ansari et al., 2020, p. 422). Di Indonesia sampai tiga tahun lalu jumlah BUMD telah berdiri sebanyak 1.097 unit (Yani & Mansur, 2020, p. 368) yang pada umumnya memiliki kendala dalam permodalan (Adji Suradji Muhammad, Irman, 2020, p. 42) yang dibentuk untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum



dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah (Surahman, 2020, p. 320) tetapi kurang berani menempatkan diri sebagai bisnis yang berorientasi pada profit (Alwi, 2002, p. 89).

Berikut penerimaan kas dari hasil investasi tunai yang berasal dari bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) dan dividen atas penyertaan modal pada perseroan terbatas tahun 2020 dan empat tahun sebelumnya.

**Tabel 7.** Pendapatan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dan sebelumnya (dalam Rupiah)

Uraian	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Pihak ketiga	Jumlah
Realisasi 2020	48.538.095.543	623.953.439.096	673.491.534.639
Realisasi 2019	116.911.655.083	502.544.811.377	619.456.466.460
Realisasi 2018	103.103.721.171	489.852.555.182	592.956.276.353
Realisasi 2017	115.812.977.501	373.665.707.172	489.478.684.673
Realisasi 2016	78.857.018.405	223.197.381.431	302.054.399.836

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, 2019, 2018, 2017 dan 2016

Tabel 7 memperlihatkan jumlah penerimaan kas dari hasil investasi semakin menaik dari tahun ke tahun mulai tahun 2016 yang tidak banyak dipengaruhi oleh Covid-19 untuk perseroan terbatas pihak ketiga. Penerimaan arus kas tersebut bersumber dari BUMD dan penempatan saham di Perseroan Terbatas. Apabila dirinci bagian dari BUMD akan terlihat dari Tabel 8 dimana penerimaan tersebut berasal dari 5 perusahaan daerah di mulai dari PDAM Jaya hingga PD PAL JAYA. PDAM belum memberikan kontribusi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 karena sedang masa *recovery* investasi setelah pengambilalihan *core* bisnis dari pihak swasta. Sepanjang lima tahunan PT Pembangunan Sarana Jaya yang bergerak dibidang pembangunan sarana dan prasarana milik Pemda DKI selalu memberikan kontribusi terbesar dan terkecil PD Dharma Jaya. PD Pasar jaya berada di urutan kedua kecuali pada tahun 2016.

**Tabel 8.** Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2020 dan Sebelumnya dalam Rupiah

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
PDAM Jaya				22.810.000.000	-
PD Dharma Jaya	3.431.606.963	5.817.605.564	2.251.994.563	250.000.000	-
PD Pasar Jaya		39.493.312.388	37.407.235.608	36.386.532.925	33.457.930.232
PD Pemb. Sarana Jaya	24.470.643.518	54.507.537.393	47.774.672.040	42.038.356.242	31.732.962.062
PD PAL Jaya	20.635.845.064	17.093.199.738	15.669.818.960	14.328.088.334	13.666.126.111
<b>Jumlah</b>	<b>48.538.095.543</b>	<b>116.911.655.083</b>	<b>103.103.721.171</b>	<b>115.812.977.501</b>	<b>78.857.018.405</b>

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, 2019, 2018, 2017 dan 2016

Bagian pemda DKI Jakarta dari BUMD hanya Rp 48,5 milyar pada tahun 2020 yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Bagian tersebut merupakan bagian atas penempatan 100% aset yang dimiliki BUMD sebagaimana tabel 5. Tabel 8 juga memberikan informasi sepanjang lima tahun pemda DKI penerimaan terbesar di BUMD terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 116, 9 milyar yang berasal dari 4 BUMD terbesar berasal dari Sarana Jaya sebesar Rp 54,5 milyar dan di ikuti oleh PD Pasar Jaya Rp 39,4 milyar. Tahun 2017 dan 2018 pola penghasilan tetap sama kecuali adanya penerimaan kas dari PDAM Pam Jaya sebesar Rp 22,8 milyar

Tabel 9 memperlihatkan perincian penerimaan dividen tunai yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah kepada perusahaan pihak ketiga tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya mulai dari PT Pembangunan Jaya hingga PT Delta Jakarta. Dividen terbesar berasal dari

Bank DKI Jakarta yang kemudian diikuti oleh PT Transportasi Jakarta pada tahun 2020. Satu tahun sebelumnya penerimaan dividen juga berasal dividen Bank DKI Jakarta dan Pembangunan Jaya Ancol serta dari Pembangunan Jaya. Pembangunan Jaya Ancol Tbk pada tahun 2020 tidak memberikan kontribusinya karena adanya Covid-19. Tahun 2016 hingga tahun 2018 kontributor utama pendapatan investasi masih tetap berasal dari tiga perusahaan utama sebagaimana tahun-tahun berikutnya.

Tabel 9 memperlihatkan pendapatan dividen dari penyertaan modal pemda DKI Jakarta tahun 2020 dan empat sebelumnya sebagaimana di bawah ini:

**Tabel 9.** Realisasi Penerimaan Dividen dari Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Tahun 2020 dan Sebelumnya dalam Rupiah

No Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
1 PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	-	61.055.999.947	59.903.999.948	35.711.999.969	79.487.999.931
2 PT. Asuransi Bangun Askrida	1.968.302.405	4.929.581.113	4.193.318.807	4.572.152.980	4.367.544.287
3 PT. Jakarta Propertindo	15.000.000.000	-	95.149.754.635	49.167.537.185	7.351.856.970
4 PT. Bank DKI Jakarta	285.899.458.670	240.044.223.176	213.605.061.635	193.488.397.170	69.522.075.465
5 PT. Jakarta Tourinsindo		1.601.250.000	-	0	500.000.000
6 PT. Jakarta International Expo				525.000.000	1.050.000.000
7 PT. Transportasi Jakarta	154.383.667.217	26.205.420.293	-	0	
8 PT. Penjamin Kredit Daerah Jakarta	2.704.000.000	3.315.000.000	1.262.740.032	663.235.850	237.500.000
9 PT. Kawasan Berikat Nusantara	6.215.979.157	8.043.424.687	10.947.297.020	7.426.454.446	3.035.587.209
10 PT Cemani Toka	2.029.809.600	335.972.000	1.821.164.800	759.828.160	
11 PT. Pembangunan Jaya	28.000.000.000	32.000.000.000	30.400.000.000	28.800.000.000	24.800.000.000
12 PT. Food Station Cipinang	18.500.000.000	7.103.769.498	5.032.786.787	3.704.354.140	3.007.195.324
13 PT. J.I.E.P	27.072.840908	17.434.236.063	12.884.249.518	11.010.621.272	4.613.538.245
14 PT. Delta Jakarta, Tbk	81.978.273.000	100.475.934.600	54.652.182.000	37.836.126.000	25.224.084.000

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, 2019, 2018, 2017 dan 2016

Pendapatan investasi Tabel 7-8 di atas tidak terlihat di laporan arus kas sub penerimaan investasi disebabkan informasi penerimaan investasi diisi oleh informasi penjualan atas tanah, barang dagangan, peralatan tidak terpakai, gedung dan tanah, serta aset lainnya dan pencairan dana cadangan serta penerimaan sumber penyertaan modal daerah. Klasifikasi investasi sebagaimana di maksud (lihat tabel 6) tidak selaras dengan pengertian yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri melalui PP DN No. 52 tahun 2012 . Hasil investasi aktual (riil) jika diklasifikasikan sebagai “ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (tabel 3)” akan menghilangkan makna dan esensi investasi sebagaimana tercantum di dalam laporan Neraca Pemerintah DKI Jakarta. Di dalam laporan tersebut jumlah investasi tertera dengan jelas (tabel 4)

PSAP No. 6 memberikan pengertian bahwa investasi adalah penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejatinya diinformasikan dalam bentuk kelompok Investasi dan di informasikan serta diungkapkan secara jelas sesuai dengan semangat otonomi daerah. Pengungkapan pendapatan investasi yang tidak sejalan dengan laporan keuangan pemerintahan daerah menimbulkan kontradiktif dalam hal transparansi dan akuntabilitas dan independensi informasi.

Transparan memiliki pengertian sesuai Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan asumsi mereka memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. (Albugis, 2016, p.80) termasuk kebebasan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah (Dito Nasution, 2018, p. 156). Sementara akuntabilitas mempunyai pengertian kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai dari tugas

pengelolaan tersebut, termasuk tugas pengelolaan keuangan daerah (Kartoprawiro & Susanto, 2018, p. 1) termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya serta kebijakan yang dijalankan dan pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik (Dito Nasution, 2018, p. 3). Independen memiliki makna laporan keuangan tidak berpihak pada pihak manapun yang menyebabkan laporan keuangan melakukan *window dressing*<sup>1</sup>. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan apa adanya dengan berpegang pada prinsip transparan dan akuntabilitas.

Investasi yang dilakukan setiap kepala daerah harus diungkapkan secara transparan dan akuntabilitas yang akan terlihat di dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas. Di dalam laporan laba rugi diungkapkan pendapatan operasional dan pendapatan investasi serta pendapatan lain-lain lain begitu juga dalam laporan arus kas akan terungkap arus kas tunai dari ketiga pendapatan tersebut. Hasil investasi di atas memperlihatkan data keuangan begitu jelas dan terbuka, dan jika tidak disajikan sebagaimana prinsip akuntansi yang berlaku umum akan membuat laporan arus kas kehilangan esensinya sebagai media informasi yang memberikan informasi besaran penerimaan kas yang berasal dari investasi.

## Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagaimana di bawah ini:

- 1) Terdapat lima pos pendapatan kas tunai yang berkontribusi tetap terhadap laporan arus kas pemerintah DKI Jakarta yaitu pendapatan kas yang berasal dari pendapatan operasional, pendapatan investasi, pembiayaan, transitoris dan penerimaan dari BULD. Pendapatan hasil operasi mendominasi penerimaan arus kas. Sementara penerimaan dari BULD selalu memberi kontribusi kedua dan kontribusi dari hasil investasi selalu bersaldo negatif.
- 2) Tidak terjadi keselarasan dalam penyajian informasi arus kas investasi yang dianggap sebagai penjualan aktiva tetap dan barang sisa pakai pemerintah. Pengklasifikasian penjualan aktiva tetap milik pemda dan barang sisa pakai sebagai pendapatan investasi mencerminkan adanya ketiak selarasan dalam penyajian laporan keuangan yang bertentangan dengan sistim akuntansi yang berlaku umum
- 3) Tidak terjadi keselarasan arus kas investasi karena Pendapatan kas tunai begitu jelas apakah berasal dari bagian laba dari BUMD atau dari dividen tunai dari investasi saham di perusahaan perseroan terbatas pihak ketiga
- 4) Esensi laporan arus kas investasi adalah menyajikan dan menginformasikan jumlah pendapatan dan pengeluaran untuk kegiatan investasi dan pengalokasian dana untuk yang sejenis. Penjualan aset pemda dan barang bekas pakai tidak bisa dikategorikan sebagai pendapatan investasi (PPDN No. 52 tahun 2012 dan PSAP No. 6)

## Rekomendasi

Pengungkapan dan penyajian direkomendasikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum karena beberapa pertimbangan, *pertama* alokasi aset pemda DKI Jakarta untuk investasi cukup signifikan (lebih 10% dari total aset, tabel 4). *Kedua* sumber hasil investasi diketahui dengan jelas dari bagaikan laba BUMD dan dari dividen perusahaan

---

<sup>1</sup> upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempercantik laporan keuangan dengan cara memanipulasi laporan keuangan untuk terlihat lebih baik sebelum dipublikasikan

yang sahamnya atau kepemilikan di bawah pemda DKI itu sendiri, *ketiga* jumlah investasi di setiap perusahaan tertera dengan jelas ( tabel 5), ke *empat*, sumber penghasilan dividen tertera secara nyata, *kelima*, perusahaan yang tidak atau memberikan kontribusi dividen tertera dengan jelas sehingga bisa di evaluasi keberadaannya (tabel 9) dan ke *enam*, informasi arus kas Investasi yang selama ini disajikan dalam laporan arus kas tidak menarik perhatian dan selalu bersaldo negatif, ke *tujuh* pemahaman pembelian aset untuk kebutuhan pelayanan pemda jika dipahami sebagai investasi tidak sejalan dengan PSAP No. 6 dan PP DN No. 52 tahun 2012 dan secara operasional tidak mencerminkan tindakan investasi

## Referensi

- Al Quran dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia, 1995
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
- Mahmudi, (2016). Analisis laporan keuangan Pemerintahan Daerah. UPP STIM YKPM, Yogyakarta
- Ball, R. (2008). What is the actual economic role of financial reporting? *Accounting Horizons*, 22(4), 427–432. <https://doi.org/10.2308/acch.2008.22.4.427>
- Barth, M. E., & Schipper, K. (2008). Financial reporting transparency. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 23(2), 173–190. <https://doi.org/10.1177/0148558X0802300203>
- Cohen, D. A. (2003). Quality of Financial Reporting Choice: Determinants and Economic Consequences. *London Business School Accounting Symposium*.
- Edwards, J.D. & Hermanson, R. H. (2013). *Accounting Principles: A Business Perspective Volume 1 Financial Accounting Accounting Principles: A Business Perspective Financial Accounting. 1.*
- Hochreiter, R., Pflug, G., & Paulsen, V. (2010). *Design and management of unit-linked life insurance contracts with guarantees. September 2006.*
- Holm, L. (2018). Cost Accounting and Financial Management for Construction Project Managers. In *Cost Accounting and Financial Management for Construction Project Managers*. <https://doi.org/10.1201/9781315147307>
- Ray H. Garrison , D.B.A., CPA Eric W. Noreen , Ph.D., CMAPeter C. Brewer , Ph.D., CPA, Managerial Accounting *F o u r t e e n t h E d i t i o n* . Miami University—Oxford, Ohio
- Hochreiter, R., Pflug, G., & Paulsen, V. (2010). *Design and management of unit-linked life insurance contracts with guarantees. September 2006.*
- Adji Suradji Muhammad, Irman, A. H. & E. S. (2020). RRe Organisasi Badan UsahaMilik Daerah Upaya Meningkatkanb Kemandirian Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(1), 35–49.
- Ahmad, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kota Makassar. *Ekonomiika*, 5(1), 17–37.
- Akbar, S. (2016). Analisa Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jiaganis*, 1(1), 31–48.
- Albugis, febriana F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(3), 78–89.

- Alwi, S. (2002). *Paradigma Baru peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah*. 1(7), 81–91.
- Amalia, F. R., & Purbadharmaja, I. B. P. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP Unud*, 2(6), 257–264.
- Andriyanty, R., & Wahab, D. (2019). Preferensi Konsumen Generasi Z terhadap Konsumsi Produk Dalam Negeri. *ETHOS (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian)*, 7(2), 280–296. <https://doi.org/10.29313/ethos.v7i2.4694>
- Andriyanty, R., & Yunaz, H. (2020). Model Gaya Hidup Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 21(1), 82–95. <https://doi.org/10.30596/jimb.v21i1.4024>
- Ansari, M. I., Jurnal, K., & Hukum, I. (2020). *The Lokal State Oned enterprice Entities AfterThe Local*. 22(3), 417–436.
- Apriansyah, H., & Bachri, F. (2006). Analisis Hubungan Kausalitas Antara Investasi Pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang. *Journal Of Economic & Development*, 4(2), 73–92.
- As Syifa Nurilah, dul M. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, penerapan Akunatnsi Keuangan , Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal Of Accounting*, 3(2), 2337–3806.
- Bakar, A. (2022a). Analisis Ketergantungan Belanja Daerah Pemda Surabaya dan Pemda Bandung Tahun 2015-2019. *Monex*, 5321(02).
- Bakar, A. (2022b). *Pemodelan Pengukuran Kinerja Pemda Dalam Menaikkan Pendapatan Pajak Dalam Perspektif Pendapatan Asli Daerah Kota Wisata Dan Kota Bisnis*. 28(1), 52–71.
- Bakar, A. (2022c). pengukuran Pendapatan Pemda Green Transportasi dan Green City Dengan Pendekatan Pertumbuhan dan Indeks Siapa yang Lebih Baik? *URNAL EKOBIS: EKONOMI, BISNIS & MANAJEMEN*, 12(2), 254–271.
- Bakar, A., & Khair, oti I. (2022). Which Local Government Financial Management is More Qualified, Jakarta or Surabaya? *Account and Financial Management Journal*, 7(9), 2899–2910.
- Bakhrudin, B., Setiawan, M. A., & Sutrisno, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal DalamMenjunjung Perkembangan Bisnis Daerah (studi Kasus Kabuoaten Kota di Jawa Timur. *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v14i1.82>
- Barth, M. E., & Schipper, K. (2008). Financial reporting transparency. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 23(2), 173–190. <https://doi.org/10.1177/0148558X0802300203>
- Cohen, D. A. (2003). Quality of Financial Reporting Choice : Determinants and Economic Consequences Quality of Financial Reporting Choice : Determinants and Economic Consequences. *London Business School Accounting Symposium*.
- Dewi, E., Amar, S., & Sofyan, E. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Konsumsi di Indonesia: *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(02), 176–193.
- Dito Nasution, A. D. (2018). Analisa Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Tranparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 153.
- Edwards, J.D. & Hermanson, R. H. (2013). *Accounting Principles : A Business Perspective Volume 1 Financial Accounting Accounting Principles : A Business Perspective Financial Accounting*. 1.
- Erwinsyahbana, T., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (n.d.). *Pertanggungjawaban*

*yuridis direksi terhadap risiko kerugian keuangan daerah pada badan usaha milik daerah.* 2, 183–212.

- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 53(9), 1689–1699.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6.
- Hasibuan, A. N., & Wahabsamad, A. (2022). *Analisa laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan perusahaan PT Karya Indoe Selera periode Tahun 2016-2020.* 2(1), 30–53.
- ISMAIL, G. (2020). IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 REGIONAL AUTONOMY IMPLEMENTATION IN HANDLING OF PANDEMIC COVID-19. *JURNAL LEMBAGA KETAHANAN NASIOANAL LEMHANAS REPUBLIK INDONESIA*, 8(3), 426–441.
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Kaunang, J. M. (2013). Analisa Laporan Arus Kas Sebagai ukur menilai Kinerja pada PT Penggadaan (persero) Cabang Manado Timur. *Emba*, 1(3), 455–464.
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar terhadap Kualitas Laporan keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290–1318.
- Kusnandar, & Siswantoro, D. (2018). Pengaruh Dana Alokasi. *Beta Asteria*, 13–30.
- Leonardus Julyano Sema, A. R. (2021). Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset* <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3985%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3985/3996>
- Mayasari, M., & Al-Musfiroh, H. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Pada Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 1(2), 83–92. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v1i2.185>
- Milyanti, R. Y. (2010). Analisis Penggunaan Laporan Arus Kas DdalamMenilai Kinerja PT Magenta Jaya Lestari di Bandar Lampung. *GEMA*, 1(1), 1–9.
- Mole, D. (2015). Penerapan Akuntansi Ekuitas Pada Pemda Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(3), 1059–1057.
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101>
- Nadiyah, F., & Suryono, B. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9), 10–27.
- Nansy Narty Hardianty Sumajow1, Ilat2, V., Wokas3, & Nicky, H. R. (2021). Analisis Laporan laba Rugi PT Pos Indonesia (Persero) Manando. *EMBA*, 9(3), 960–969.
- Ningtiyas, J. D. A. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(1), 11–17.
- Ningtiyas, P. E., & Widyanti, D. (2015). Pengaru Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(1), 1–15.

- Noveliza, D., Rina, R., & Dhamayanti, S. K. (2022). Pengaruh Umur dan Ukuran Perusahaan terhadap tanggungjawab Sosial Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai variabel Intervening. *Blogchain*, 2(2), Penelitian menguji dan menganalisis mengenai penga.
- Novtania Mokoginta, Linda Lambey, W. P. (2017). pengaruh sistem Pengendalian Intern dan System Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.
- Nurdiana, D. (2021). Pengaruh Arus Kas Operasi Dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham Pada Industri Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i1.202>
- Pangaribuan, M. T., Kajian, M., Nasional, K., Indonesia, U., Munandar, A. I., Kajian, M., Nasional, K., & Indonesia, U. (2021). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA MENANGANI PANDEMI COVID-19* Meilinda Triana Pangaribuan Magister Kajian Ketahanan Nasional, Fakultas Kajian Stratejik dan Global, Adis Imam Munandar Magister Kajian Ketahanan Nasional, Fakultas Kajian Stratejik dan Global, . 14, 1–9.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Prihanto, H., & Damayanti, P. (2022). Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umrah. *Journal of Management and Business Review*, 19(1), 29–48. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v19i1.314>
- Publicuho, J., Tuwu, D., & Kendari, K. (2020). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19*. 3(2), 267–278. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Riesmiyantiningtias, N., & Siagian, A. O. (2020). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk. *Jurnal Akrab Juara*, 5(4), 244–254. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1297/1145>
- Riftiasari, D. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta ----. *Jurnal AKRAB JUARA*, 3(3), 190–200.
- Riyantie, M., Alamsyah, A., & Pranawukir, I. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Kopi Janji Jiwa Di Era Digital Dan Era Pandemi Covid-19. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(2), 255–267. <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i2.1721>
- Romy P. Mansaleo, Hendrik Manossoh, V. Z. T. (2016). Evsluasi Penerapan Laporan Arus Kas Berdasarkan PSAK No. 2 Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 962–971.
- Saputra, K. A. K., Priliandani, N. M. I., Pradnyanitasari, P. D., & Larasdiputra, G. D. (2019). Case-Based Learning Dalam Pembelajaran Akuntansi Sektor Publik. *Aksioma*, 18(1), 1–43.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Vol.8 No.2 Januari 2018*, 8(2), 54–68.
- Sartini, L. P. N., & Purbawangsa, I. B. A. (2014). Pengaruh Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen, Serta Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(2), 81–91.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall: Toronto*.
- Seputra, I. I. (2020). PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN COVID-19 OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI 1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.

- Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa - Bali). *Simposium Nasional Akuntansi X, June*, 1–29.
- Sian, S., & Roberts, C. (2009). UK small owner-managed businesses: Accounting and financial reporting needs. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 16(2), 289–305. <https://doi.org/10.1108/14626000910956065>
- Sitepu, S., Purwanto, B., & Irwanto, A. K. (2018). Pengaruh Arus Kas Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Emiten Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 8(3), 236. <https://doi.org/10.29244/jmo.v8i3.22472>
- Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., & Politik, I. (2021). *Komunikasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: Kasus Dinamika Pelaksanaan Local Lockdown Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19* Ardi Putra 1 , Tito Handoko 2. 2(April), 1–15. <https://doi.org/10.24014/jdr.v30i2.0000>
- Sunder, S. (2001). Knowing What Others Know: Common Knowledge, Accounting, and Capital Markets. *Yale University, SOM*.
- Surahman, A. L. & A. (2020). BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH. *Bilancia*, 14(2), 319–3140.
- Suteja, I. G. N. (2018). Analisis kinerja keuangan dengan metode altman z-score pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk. *Moneter*, V(1), 12–17. p-ISSN 2355-2700 e-ISSN 2550-0139
- Tambunan, G. M. (2021). Paradigma Baru Pelaksanaan Investasi Pemerintah Pusat dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1987>
- Trianto, A., Studi, P., Politeknik, A., & Palembang, D. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Pt. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim*. 8(03).
- Wadi1, R. (2020). Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(7), 613–624.
- Widjanarko, & Nurmelia, S. (2020). Pengaruh Laba Bersih, Hutang & Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Terhadap Kebijakan Dividend Pada Perusahaan Manufacture Yang Listing Di Bei Tahun 2013 - 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 50–63.
- Wood, F., & Sangster, A. (2013). *Frank Wood's Business Accounting 1 - Frank Wood, Alan Sangster* - Google Books. [https://books.google.ie/books?id=-DgLEheXqv4C&printsec=frontcover&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.ie/books?id=-DgLEheXqv4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
- Yani, T. A., & Mansur, T. M. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 363–378. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16184>
- Zulkifli, Z., Bakhri, B. S., & Rahmawati, R. (2019). Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ithidhad Pekanbaru. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16(1), 1–22. [https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16\(1\).2869](https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(1).2869)